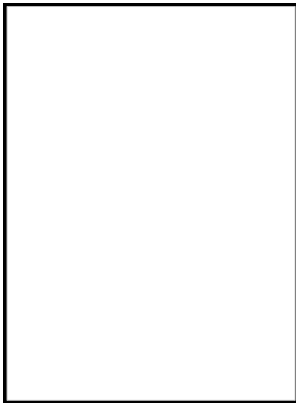


Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) Propinsi Sumatera Barat tahun 2008

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Propinsi Sumatera Barat - PERGUB Prov. Sumatera Utara No. 17 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara [JDIH BPK RI]



Description: Work plan for year 2007 of Sumatera Barat Province.
-Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) Propinsi Sumatera Barat tahun 2008
-Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) Propinsi Sumatera Barat tahun 2008
Notes: Microfiche. Jakarta : Library of Congress Office ; Washington, D.C. : Library of Congress Photoduplication Service. 2008. 11 microfiches. Master microform held by: DLC.
This edition was published in 2007



Filesize: 41.94 MB

Tags: #peraturan_walikota

Perda No.2 Th 2007 Tentang Pokok

Bagian Keenam Penggunaan Air untuk Air Irigasi Langsung dari Sumber Air Pasal 41 1 Setiap pemakai air yang menggunakan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan, harus mendapat izin dari Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air. Peran masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam penataan ruang karena pada akhirnya hasil penataan ruang adalah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat serta untuk tercapainya tujuan penataan ruang, yaitu terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Untuk Kota Simpang Ampek, perkembangan kota yang terjadi dalam kurun waktu 2012-2015 adalah sebagai berikut : 1.

peraturan_walikota

FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN 2016 Peraturan Gubernur PERGUB NO. Proses Penyusunan RDTR Kota Simpang Ampek 4-7 4.

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2007

Rencana jaringan air bersih dan air minum terkait sumber air baku, jaringan dan distribusi, dan pengaturan area resapan air. Pasal 20 1 Komisi irigasi antar provinsi dapat dibentuk oleh para gubernur yang bersangkutan.

Undang

Acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW; c. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada Nagari.

Himpunan Peraturan Pertanahan

Melihat rumusan di dalam Perda TUP, terutama pada bagian pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan pihak lain, seperti kepentingan pembangunan dan investasi, terlihat bahwa rumusan yang diatur belum mencerminkan penerapan konsep FPIC. Selanjutnya Pasal 19 berbunyi: Negara patut berkonsultasi dan bekerjasama dengan niat baik yang saling mempercayai dengan masyarakat adat terkait lewat lembaga perwakilan mereka sendiri untuk mendapatkan persetujuan yang bebas, mendahului tindakan, setelah ada informasi yang jelas kepada mereka untuk mendapatkan persetujuan sebelum mengadopsi dan menerapkan tindakan-tindakan legislatif atau administratif yang dapat berdampak terhadap mereka.

Kajian Hukum terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 6/2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

Hal 4-5 Budi Harsono, 2003. Tentunya, kondisi diatas juga berlaku pada konteks sumatera barat. Pada tanggal 24-25 Oktober 2000 lokakarya tanah ulayat yang dilaksanakan di Padang membahas hasil temuan penelitian Proyek di atas yang kemudian di respon dengan pembentukan tim pembahasan perumusan dan sosialisasi tentang pengaturan pemanfaatan tanah ulayat masyarakat hukum adat di Propinsi Sumatera Barat oleh Pemerintah propinsi Sumatera Barat.

PERGUB Prov. Sumatera Utara No. 17 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara [JDIH BPK RI]

Dalam penyusunan rencana tata ruang ke depannya, produk rencana yang disusun harus bersifat visioner berjangka panjang dan inovatif tidak normatif, sehingga muatan tidak hanya sekedar memenuhi cakupan minimal pada pedoman penyusunan rencana yang ada. Rencana Pola Ruang Rencana pola ruang merupakan rencana distribusi zona peruntukan ke dalam blok-blok.

Related Books

- [Harakāt al-Shīah al-mutatarrifin.](#)
- [Biao zhun dian ma ben = - Piao zhun dian maben](#)
- [National defence policies of the NATO allies - internal tensions and out-of-area problems : confere](#)
- [Productivity - a series from Industrial engineering](#)
- [En pays d'Auge - Le Sap à travers les âges](#)